



Strategi Pendamping Sosial Dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat (Studi Pada Program Keluarga Harapan Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung)

Eli Susanti¹⁾, Rini Setiawati²⁾, Tontowi Jauhari³⁾, M. Mawardi J⁴⁾, Fitri Yanti⁵⁾

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

86elisuusanti@gmail.com¹, rinisetiawati@radenintan.ac.id², tontowijauhari@radenintan.ac.id³,
m.mawardij@radenintan.ac.id⁴, fitriyanti@radenintan.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya capaian graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yang menunjukkan bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pendamping sosial dalam mendorong graduasi mandiri, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut di Kelurahan Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode grounded theory. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Ketua Tim PKH, pendamping sosial, serta KPM graduasi dan non-graduasi. Informan dipilih secara purposive untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendamping sosial dalam mendorong graduasi mandiri dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi, meliputi pendekatan struktural, edukatif melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pendekatan relasional melalui kunjungan rumah (home visit), serta pendekatan adaptif melalui diferensiasi berdasarkan kondisi KPM, dan penguatan ekonomi produktif melalui fasilitasi akses program pemberdayaan seperti PPSE. Strategi ini menunjukkan bahwa pendamping berperan tidak hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator dan agen perubahan. Keberhasilan graduasi mandiri dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa kesadaran, motivasi, dan perubahan pola pikir KPM, serta dukungan pendamping sosial dan akses terhadap program pemberdayaan. Namun demikian, terdapat faktor penghambat yang meliputi masih kuatnya mindset ketergantungan terhadap bantuan sosial, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan KPM, serta kendala struktural berupa keterbatasan dukungan operasional dan tingginya beban administratif pendamping yang memengaruhi intensitas pendampingan. Dalam menghadapi hambatan tersebut, pendamping sosial melakukan berbagai upaya adaptif, antara lain melalui penguatan motivasi dan transformasi pola pikir KPM secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas melalui pendampingan intensif, serta strategi prioritas dan optimalisasi waktu dalam menghadapi keterbatasan struktural.

Kata kunci: Strategi Pendamping Sosial, Pemberdayaan, Graduasi Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Abstract

This study was motivated by the still-low rate of self-reliance among Beneficiary Families (KPM) in the Family Hope Program (PKH), indicating that social assistance has not yet been fully effective in promoting beneficiary self-reliance. This study aims to analyze the strategies of social workers in promoting self-reliant graduation, identify supporting and inhibiting factors, and examine the efforts made to overcome these obstacles in Sukajawa Baru Village, Tanjung Karang Barat Subdistrict, Bandar Lampung City. This study employs a qualitative approach using the grounded theory method. Data collection techniques included in-



depth interviews, observations, and documentation involving the PKH Team Leader, social workers, as well as graduated and non-graduated KPM. Informants were selected through purposive sampling to obtain data relevant to the research focus. The results indicate that social workers' strategies to promote self-directed graduation are implemented through an integrated approach, encompassing structural and educational approaches via Family Capacity Building Meetings (P2K2), relational approaches through home visits, as well as adaptive approaches through differentiation based on beneficiary conditions, and the strengthening of productive economic activities through facilitating access to empowerment programs such as PPSE. This strategy demonstrates that social workers serve not only as program implementers but also as facilitators and agents of change. The success of self-directed graduation is influenced by supporting factors such as awareness, motivation, and shifts in the mindset of program beneficiaries, as well as support from social workers and access to empowerment programs. However, there are inhibiting factors, including a still-strong mindset of dependence on social assistance, low levels of education and skills among program beneficiaries, as well as structural constraints such as limited operational support and the high administrative burden on social workers, which affect the intensity of their support. In addressing these obstacles, social workers undertake various adaptive measures, including the continuous strengthening of beneficiaries' motivation and transformation of their mindset, capacity building through intensive support, and the implementation of prioritization strategies and time optimization to address structural limitations.

Key words: *Social Facilitator Strategies, Empowerment, Self-Graduation, Family Hope Program (PKH), Beneficiary Families (KPM).*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2025 tercatat sebesar 8,25 % yang setara dengan 23,36 juta jiwa (Statistik, 2025). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang beragam antara lain dari segi struktural yaitu keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan yang layak. Sedangkan dari segi kultural diantaranya pola pikir, budaya kerja, dan keterbatasan kemampuan berwirausaha juga dari situasional terjadi karena dampak bencana, pandemi, PHK, dan *fluktuasi ekonomi global* (Sugianto, 2025).

Berbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, antara lain melalui Program Bantuan Sosial (seperti PKH, BPNT/Sembako, Subsidi listrik, BLT), Penyediaan akses layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Rumah Subsidi, Air Bersih), Pemberdayaan Ekonomi (Pelatihan Keterampilan, Akses Permodalan, Pengembangan Usaha Mikro dan kecil atau UMKM), Pengembangan Infrastruktur dan Jaminan Sosial lainnya (Janah & Tampubolon, 2024). Program-program tersebut dijalankan secara terintegrasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta juga masyarakat yang diharapkan tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat sehingga mencapai tujuan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memutus mata rantai kemiskinan antar generasi (Andaniyati et al., 2021). PKH memberikan bantuan sosial bersyarat atau dikenal dengan *conditional cash transfer* kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan rumah tangga atau keluarga yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) karena tergolong miskin dan rentan secara ekonomi.

Menurut Pedoman Umum PKH, KPM adalah keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga dengan kriteria tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, lanjut usia, atau penyandang disabilitas berat (Indonesia, 2023). KPM ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS). Tujuan utama penetapan KPM adalah memastikan bantuan sosial tepat sasaran kepada keluarga yang paling membutuhkan, sekaligus menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi melalui pendampingan dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) (Indonesia, 2022a).

PKH memberikan bantuan sosial bersyarat kepada KPM dengan kewajiban memenuhi komitmen di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan sosial, melainkan juga dari kemampuan penerima manfaat untuk mencapai kondisi mandiri dan keluar dari kepesertaan program melalui mekanisme graduasi mandiri.

Tabel 1. Skema Bantuan PKH

Komponen Bantuan	Kategori Penerima	Indek Bantuan / Tahun	Tujuan Bantuan
Komponen Kesehatan	Ibu hamil	Rp 3.000.000	Meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak
	Anak usia dini (0–6 tahun)	Rp 3.000.000	Mendukung tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting
Komponen Pendidikan	Anak SD/ sederajat	Rp 900.000	Menjamin keberlanjutan pendidikan dasar
	Anak SD/ sederajat	Rp 900.000	Menjamin keberlanjutan pendidikan dasar
	Anak SMP/ sederajat	Rp1.500.000	Mencegah putus sekolah
Komponen Kesejahteraan Sosial	Anak SMA/ sederajat	Rp 2.000.000	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial
	Lanjut usia (\geq 70 tahun)	Rp 2.400.000	Menjamin kebutuhan dasar lansia

Sumber: Pedoman Umum PKH Kemensos RI

PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social (Andika & Safitri, 2021). Bantuan yang diberikan bersifat non-permanen, artinya hanya diberikan selama penerima manfaat masih memenuhi kriteria miskin dan belum mencapai kemandirian. Program PKH dirancang tidak sekadar memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Suharto, 2014).

Tabel 2. Skema Sasaran dan Tujuan PKH

Komponen Bantuan	Sasaran	Bentuk Bantuan
Bantuan Tetap	Seluruh KPM PKH	Bantuan tunai tetap per tahun
Pendampingan Sosial	Seluruh KPM PKH	Edukasi dan fasilitasi (P2K2)
Graduasi Mandiri	Seluruh KPM PKH	Pengakhiran kepesertaan secara sukarela

Sumber: padantuan umum PKH KEMENSOS RI

Secara konseptual, PKH berlandaskan pada pendekatan pembangunan sosial (*social development approach*) yang memadukan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Midgley menjelaskan bahwa pembangunan sosial menempatkan intervensi sosial sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi dan bertujuan meningkatkan kapasitas individu serta keluarga agar mampu berfungsi secara sosial dan ekonomi (Midgley, 1995). Dalam konteks ini, PKH tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Keberhasilan Program Keluarga Harapan tidak hanya diukur dari ketepatan sasaran dan penyaluran bantuan, tetapi juga dari kemampuan KPM untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri (Indonesia, 2022b). Oleh karena itu, PKH mengenal konsep graduasi, khususnya graduasi mandiri, yaitu kondisi ketika KPM secara sadar dan sukarela keluar dari kepesertaan program

karena telah mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada bantuan sosial. Dengan demikian, PKH secara normatif diarahkan untuk mendorong kemandirian KPM dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dalam jangka Panjang (Septiana et al., 2025).

Graduasi mandiri merupakan kondisi ketika keluarga penerima manfaat (KPM) secara sadar dan sukarela menyatakan diri tidak lagi membutuhkan bantuan PKH karena telah memiliki kemampuan ekonomi dan sosial yang lebih baik (Khoiriyah & Kunarti, 2019). Konsep graduasi mandiri menjadi indikator penting keberhasilan program, karena menunjukkan adanya peningkatan kemandirian, kapasitas, serta keberdayaan penerima manfaat. Dalam praktiknya, capaian graduasi mandiri masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah total KPM PKH, termasuk di wilayah perkotaan yang memiliki akses sumber daya ekonomi relatif lebih beragam (Safei, 2016).

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan dalam mendorong KPM PKH untuk mencapai graduasi mandiri. Salah satu kecamatan dengan jumlah penerima manfaat PKH yang cukup signifikan adalah Kecamatan Tanjung Karang Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik wilayah perkotaan inti dengan akses ekonomi dan layanan sosial yang relatif lebih terbuka dengan karakteristik yang heterogen, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun mata pencaharian masyarakat, menuntut adanya strategi pendampingan yang adaptif dan kontekstual (Bintarto, 2010). Dalam kondisi tersebut, peran pendamping sosial PKH menjadi sangat strategis sebagai aktor lapangan yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat.

Tabel 3. Jumlah KPM PKH dan Capaian Graduasi Kecamatan Tanjung Karang Barat

No	Kecamatan	Σ KPM	Σ Graduasi	Porsentase
1	Gedong Air	431	0	0 %
2	Kelapa Tiga Permai	249	0	0 %
3	Segala Mider	285	4	1,4 %
4	Sukadanaham	325	8	2,4 %
5	Sukajawa	476	4	0,8 %
6	Sukajawa Baru	273	6	2,2 %
7	Susunan Baru	288	2	0,7 %
	Total	2.327	24	1 %

Sumber: Data base aplikasi siks pendamping Kecamatan Tanjung Karang Barat Februari 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Karang Barat per Februari 2026 mencapai 2.327 keluarga, namun capaian graduasi hanya 24 keluarga atau sekitar 1%, yang menunjukkan bahwa tujuan kemandirian program belum berjalan optimal. Bahkan terdapat kelurahan seperti Gedong Air dan Kelapa Tiga Permai yang sama sekali belum mencatatkan graduasi (0%), mengindikasikan masih kuatnya ketergantungan terhadap bantuan sosial. Di tengah capaian yang relatif rendah tersebut, Sukajawa Baru mencatat 6 KPM yang sudah menggraduasikan diri dari kepesertaan PKH dari 273 KPM (2,2%), angka yang secara persentase termasuk di antara yang tertinggi di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua KPM PKH mampu atau siap untuk mencapai graduasi mandiri. Masih ditemukan KPM yang cenderung mempertahankan status kepesertaan PKH karena berbagai faktor, antara lain keterbatasan kemampuan ekonomi, rendahnya literasi usaha, faktor sosial budaya, serta ketergantungan terhadap bantuan sosial (Suharto, 2014). Bansos pada dasarnya dirancang sebagai instrumen kebijakan jangka pendek untuk melindungi kelompok rentan dari risiko sosial dan ekonomi, namun dalam praktiknya sebagian penerima manfaat justru menjadikan bansos sebagai sumber penghidupan utama, sehingga menimbulkan mindset ketergantungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan sosial, tetapi juga oleh kemampuan KPM untuk mencapai kemandirian dan keluar dari ketergantungan program melalui mekanisme graduasi mandiri. Tujuan penelitian pertama menganalisis strategi pendamping sosial



dalam mendorong graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendampingan KPM PKH menuju graduasi mandiri. Ketiga, mendeskripsikan upaya pendamping sosial dalam mengatasi hambatan pendampingan guna mendorong tercapainya graduasi mandiri KPM PKH.

Teori Strategi Pendamping Sosial

Menurut *Chandler*, strategi adalah penetapan tujuan jangka Panjang suatu organisasi, serta penetapan tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (*Chandler*, 1962). Sementara itu, *Glueck* mendefinisikan strategi sebagai rencana yang menyatukan tujuan utama, kebijakan, dan tindakan suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang kohesif (*Glueck*, 1980). Strategi memiliki beberapa fungsi penting antara lain memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, dan memastikan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program (*Rangkuti*, 2019).

Teori Pemberdayaan Sosial

Menurut *Rappaport*, pemberdayaan adalah proses dimana individu, organisasi, dan komunitas memperoleh penguasaan terhadap urusan mereka sendiri. Konsep ini menekankan pentingnya kesadaran kritis (*critical awareness*), partisipasi aktif, serta kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan, melainkan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat (*Rappaport*, 1987).

Dalam perspektif pembangunan sosial, *Midgley* menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan bagian dari strategi pembangunan yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberdayaan diarahkan untuk memperkuat kemampuan individu dan keluarga agar mampu berpartisipasi secara produktif dalam sistem sosial dan ekonomi (*Midgley*, 1995).

Teori Peran dalam Pendampingan Sosial

Menurut *Biddle*, peran sosial terbentuk melalui interaksi antara struktur sosial dan perilaku individu. Pendamping sosial harus mampu menyesuaikan perannya dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi penerima manfaat. Fleksibilitas peran ini menjadi kunci keberhasilan pendampingan, terutama dalam mendorong perubahan perilaku dan kemandirian (*Midgley*, 1995).

Pendamping sosial merupakan sumber daya manusia strategis dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping sosial berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan realitas sosial penerima manfaat di tingkat akar rumput. Dalam konteks PKH, pendamping sosial tidak hanya bertugas memastikan tersalurkannya bantuan sosial, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan, pemberdayaan, serta penguatan kapasitas keluarga penerima manfaat agar mampu mencapai kemandirian dan graduasi mandiri.

Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial menjelaskan proses transformasi yang terjadi dalam struktur, nilai, dan pola perilaku masyarakat sebagai respons terhadap dinamika sosial. Menurut *Talcott Parsons* dalam perspektif fungsionalisme, perubahan sosial terjadi sebagai bentuk penyesuaian sistem sosial terhadap ketidakseimbangan yang muncul, sehingga masyarakat akan beradaptasi untuk mencapai kondisi keseimbangan baru (*Parsons*, 1951).

Sementara itu, *Karl Marx* memandang perubahan sosial sebagai hasil dari konflik dalam struktur ekonomi yang mendorong terjadinya transformasi sosial. Dalam konteks penelitian ini, perubahan sosial dipahami sebagai proses perubahan pola pikir dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian melalui proses pendampingan sosial yang berkelanjutan (*Marx*, 1970).

Teori Graduasi Mandiri KPM PKH

Graduasi mandiri merupakan konsep kunci dalam kebijakan perlindungan dan



pemberdayaan sosial, khususnya dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Graduasi mandiri dimaknai sebagai kondisi ketika keluarga penerima manfaat mampu keluar dari kepesertaan PKH secara sukarela karena telah mencapai tingkat kesejahteraan tertentu dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (Indonesia, 2023). Konsep ini mencerminkan keberhasilan program dalam mengubah penerima manfaat dari posisi ketergantungan menuju kemandirian sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara konseptual, graduasi mandiri tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan struktural (Suharto, 2014). Keluarga yang berhasil melakukan graduasi mandiri ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta kapasitas mengelola risiko sosial dan ekonomi. Dengan demikian, graduasi mandiri merupakan hasil dari proses pemberdayaan yang bersifat multidimensional dan berjangka panjang.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Grounded Theory*. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, strategi, dan dinamika yang dilakukan oleh pendamping sosial dalam mendorong terjadinya graduasi mandiri pada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi empiris yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder berupa dokumen dan data pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH dan capaian graduasi mandiri. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu Reduksi data, Pengodean (coding), Kategorisasi, dan Penarikan Kesimpulan Teoretis, dengan mengikuti prosedur *Grounded Theory* yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, member check, serta peningkatan ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pendamping Sosial dalam Mendorong Graduasi Mandiri

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial memiliki strategi yang terstruktur dan sistematis dalam mendorong graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga diarahkan pada proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, strategi pendampingan dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, yaitu pendekatan Struktural, Edukatif, Personal, Diferensiasi dan Penguatan Ekonomi Produktif.

Pertama, pendekatan Struktural merupakan strategi yang berlandaskan pada kebijakan dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian KPM. Pendamping sosial berperan sebagai pelaksana kebijakan sekaligus agen perubahan yang menginternalisasikan nilai-nilai kemandirian kepada KPM.

Kedua, pendekatan Edukatif dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan secara rutin. Melalui kegiatan ini, pendamping sosial memberikan edukasi kepada KPM terkait pengelolaan keuangan keluarga, pendidikan anak, serta kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran KPM sebagai modal dasar dalam mencapai kemandirian.

Ketiga, pendekatan personal dilakukan melalui kunjungan rumah (*home visit*) sebagai



bentuk interaksi langsung antara pendamping sosial dan KPM. Pendekatan ini memungkinkan pendamping untuk memahami kondisi riil KPM secara lebih mendalam, sekaligus memberikan motivasi dan penguatan secara individual. Pendekatan personal ini juga menjadi sarana untuk membangun hubungan kepercayaan (*trust building*) yang penting dalam proses perubahan sosial.

Keempat, pendekatan diferensiasi diterapkan dengan menyesuaikan strategi pendampingan berdasarkan kondisi, potensi, dan tingkat kesiapan masing-masing KPM. Pendamping sosial tidak menggunakan pendekatan yang seragam, melainkan melakukan klasifikasi terhadap KPM, khususnya dalam melihat potensi usaha dan kesiapan ekonomi. KPM yang dinilai memiliki potensi lebih diberikan dorongan yang lebih intensif untuk mencapai kemandirian.

Kelima, pendekatan penguatan ekonomi produktif dilakukan melalui fasilitasi akses terhadap program pemberdayaan ekonomi. Pendamping sosial berperan aktif dalam mengidentifikasi KPM yang memiliki usaha, kemudian mengusulkan mereka untuk mendapatkan bantuan tambahan sebagai modal pengembangan usaha.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek sosial, tetapi juga pada penguatan ekonomi sebagai faktor kunci dalam mendorong graduasi mandiri. Dengan demikian, strategi pendamping sosial dalam mendorong graduasi mandiri KPM PKH merupakan suatu proses yang komprehensif, yang mengintegrasikan berbagai pendekatan secara sistematis. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu KPM, tetapi juga untuk menciptakan perubahan pola pikir dan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pendamping dalam Mendorong Graduasi Mandiri KPM PKH

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa dalam proses pendampingan untuk mendorong graduasi mandiri KPM PKH terdapat faktor-faktor yang mendukung serta faktor-faktor yang menjadi penghambat.

a. Faktor Pendukung

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pendamping sosial dalam mendorong graduasi mandiri KPM, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri KPM, seperti adanya kesadaran untuk mandiri, motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta perubahan pola pikir yang tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. KPM yang memiliki motivasi kuat cenderung lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pendampingan serta berupaya mengembangkan usaha yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi peran aktif pendamping sosial dalam memberikan edukasi, motivasi, serta pendampingan secara intensif melalui kegiatan P2K2 dan kunjungan rumah (*home visit*). Selain itu, adanya dukungan program pemberdayaan seperti bantuan usaha juga menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian KPM.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan berbagai faktor penghambat yang dihadapi oleh pendamping sosial dalam mendorong graduasi mandiri KPM. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya pola pikir ketergantungan KPM terhadap bantuan sosial. Bantuan PKH dianggap sebagai sumber keamanan ekonomi sehingga KPM merasa khawatir apabila bantuan tersebut dihentikan.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan KPM juga menjadi kendala dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Keterbatasan modal usaha serta akses terhadap peluang ekonomi turut memperlambat proses graduasi mandiri. Di sisi lain, pendamping sosial juga menghadapi kendala struktural, seperti keterbatasan dukungan operasional serta tingginya beban administratif yang harus dijalankan. Hal ini berdampak pada terbatasnya waktu dan intensitas pendampingan yang dapat diberikan kepada KPM.



Upaya Pendamping Sosial dalam Mengatasi Hambatan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pendamping sosial melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam proses mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat.

Pertama, upaya Pendamping Sosial dalam mengatasi mindset ketergantungan KPM terhadap bantuan melalui pemberian edukasi dan motivasi secara berkelanjutan. Pendamping memberikan pemahaman kepada KPM mengenai pentingnya kemandirian ekonomi melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Selain itu, pendamping juga melakukan kunjungan rumah (*home visit*) untuk memberikan motivasi secara langsung kepada KPM.

Kedua, Upaya dalam mengatasi rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan KPM. Dalam mengatasi hal ini pendamping sosial melakukan pendampingan secara intensif serta memberikan arahan terkait pengelolaan usaha sederhana. Pendamping juga membantu KPM dalam mengenali potensi yang dimiliki serta mendorong mereka untuk mengembangkan usaha sebagai sumber penghasilan.

Ketiga, Selain hambatan yang berasal dari KPM, ditemukan pula kendala struktural yang dihadapi oleh pendamping sosial, seperti keterbatasan dukungan operasional dan tingginya beban administratif. Dalam mengatasi hal tersebut, pendamping sosial melakukan penyesuaian dalam proses pendampingan, antara lain dengan memprioritaskan KPM yang dinilai memiliki potensi untuk mencapai kemandirian serta mengoptimalkan waktu pendampingan yang tersedia. Dengan demikian, upaya yang dilakukan pendamping sosial dalam mengatasi hambatan graduasi mandiri KPM dilakukan secara beragam sesuai dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping sosial dalam mendorong graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui strategi yang terstruktur, didukung oleh berbagai faktor, serta dihadapkan pada sejumlah hambatan yang direspons melalui upaya yang adaptif.

Strategi pendamping sosial dalam mendorong graduasi mandiri dilaksanakan melalui pendekatan struktural, edukatif, personal, serta penguatan ekonomi produktif. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pendamping tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai fasilitator dan agen perubahan yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian KPM.

Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung yang memperkuat proses pendampingan, seperti adanya kesadaran dan motivasi KPM untuk mandiri, peran aktif pendamping sosial, serta dukungan program pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, proses tersebut juga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, antara lain masih kuatnya pola pikir ketergantungan KPM terhadap bantuan sosial, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta kendala struktural yang dihadapi oleh pendamping sosial.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendamping sosial melakukan berbagai upaya yang bersifat adaptif dan kontekstual, seperti pemberian edukasi dan motivasi secara berkelanjutan, pendampingan intensif dalam pengembangan kapasitas KPM, serta penyesuaian strategi pendampingan dalam menghadapi keterbatasan struktural. Upaya tersebut menunjukkan bahwa proses pendampingan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

Berdasarkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mendorong graduasi mandiri KPM tidak hanya ditentukan oleh strategi yang diterapkan, tetapi juga oleh sinergi antara faktor internal KPM, peran pendamping sosial, serta dukungan sistem program yang berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andaniyati, N. S., Destiningsih, R., Septiani, Y., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2021). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Magelang Tahun 2020. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(1), 278–291. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/2685>
- Andika, S., & Safitri. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu). *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–55. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.227>
- Bintarto. (2010). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*. MIT Press.
- Glueck, W. F. (1980). *Business Policy and Strategic Management*. McGraw-Hill.
- Indonesia, K. S. R. (2022a). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Panduan Umum*. Pusdatin Kesos.
- Indonesia, K. S. R. (2022b). *Petunjuk Teknis Graduasi Mandiri PKH*. Kemensos RI.
- Indonesia, K. S. R. (2023). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739–746. <https://teewanjournal.com/index.php/peng> eISSN
- Khoiriyah, N., & Kunarti, K. (2019). GRADUASI MANDIRI: BENTUK KEBERDAYAAN PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN PATI. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 143–156.
- Marx, K. (1970). *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Progress Publishers.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Rangkuti, F. (2019). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rappaport, J. (1987). Empowerment as a Process: Toward a Theory for Community Psychology. *Journal of Community Psychology*, 15(2), 121.
- Safei, A. A. (2016). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 32(2), 215.
- Septiana, D., Supriyanto, A., Anisa, Y., & Yunus, M. (2025). Pengaruh Efektivitas Kegiatan Family Development Session (Fds) Sebagai Upaya Pemberdayaan Terhadap Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (Pkh) Kasus Masyarakat Desa Pungut Hilir-Kerinci. *JURNAL INOVASI EKONOMI KREATIF*, 6(2), 359–370.
- Statistik, B. P. (2025). *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025*.
- Sugianto, S. (2025). *MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KAMPUNG SDGs TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia Kabupaten Jember)* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70741/>
- Suharto, E. (2014). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta.